

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM  
PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN  
PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER  
DAYA LOKAL**

OLEH

**Roza Aprilianti/ 1301110322**

(rozaapril@gmail.com)

**Pembimbing : Dr. Febri Yuliani M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

**Abstract**

*One of the pillars in the development of national food security is food diversification program. The program aims to anticipate possibilities of food shortages especially staple food. In Indonesia, one of the national food security development areas and sago producing center is Kepulauan Meranti Regency. But the use of sago as a local food source of carbohydrates in Kepulauan Meranti is still low compared to rice food commodities. Based of research showed The Accelerating Diversification Of Food Consumption (P2KP) based on local resources is not optimally yet. Based on this, researcher are interested to studying how the effort of Kepulauan Meranti regency government in application of Presidential Regulation number 22 year 2009 about policy of accelerating diversification of food consumption based on local resources. Theoretical concept used is implementation in Van Meter and Van Horn (2013) who said that there was several variables that affected the performed of the public policy implementation. This research used qualitative method by using snowball as information and the data analysis technique by using triangulation technique. Result of the research showed that implementation of the Accelerating Diversification Of Food Consumption (P2KP) based on local resources is not optimally yet. This is caused by limited human resources, infrastructure, and habit of society who are not consuming sago as a staple food in Kepulauan Meranti Regency.*

*Keyword : The Accelerating Diversification Of Food Consumption (P2KP), Implementation, Kepulauan Meranti Regency.*

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam yang melimpah baik hayati maupun non hayati. Sebagai negara yang terletak di daerah tropika basah, Indonesia kaya akan tanaman penghasil karbohidrat dan mampu menjadi sumber karbohidrat terbesar di dunia terutama dalam hal pangan.

Menurut OXFAM (*Oxford Committee for Famine Relief*) dalam Budi Winarno (2012:301), Ketahanan pangan adalah kondisi ketika setiap orang dalam segala waktu memiliki akses dan kontrol atas jumlah pangan yang cukup dan kualitas yang baik demi hidup yang sehat dan aktif. Dua kandungan makna yang tercantum disini yakni: ketersediaan dalam artian kualitas, kuantitas dan akses (hak atas pangan melalui pembelian, pertukaran, maupun klaim).

Salah satu pilar dalam pembangunan ketahanan pangan nasional adalah program penganekaragaman pangan. Program ini tidak lain bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan bahan pangan terutama bahan makanan pokok. Mengingat disatu sisi telah terjadi laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, sedangkan disisi lain terus terjadi pengurangan lahan pertanian menjadi daerah industri atau pemukiman. Jika ditinjau dari kemandirian pangan maka penganekaragaman konsumsi pangan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada satu jenis pangan. Dengan demikian, penganekaragaman konsumsi pangan merupakan fondasi dari keberlanjutan ketahanan pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun kelestarian lingkungan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dijelaskan bahwa penentu mutu makanan adalah keanekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan.

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) sangat jelas dilapangan, terutama pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, baik itu melalui integrasi berbagai kegiatan dalam mewujudkan pengembangan ekonomi daerah, maupun dari segi pelaksanaan dan pembiayaannya. Selain itu, gubernur dan bupati/walikota sebagai integrator utama memiliki peranan penting dalam mengoordinasikan gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan P2KP terutama bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Kepulauan Meranti.

Sagu (*Metroxylon sp.*) merupakan salah satu sumber karbohidrat yang layak untuk dikembangkan dalam rangka mencapai ketahanan pangan. Menurut Menteri Pertanian (2010) tanaman sagu sangat potensial untuk dikembangkan sebagai bahan pangan alternatif bagi masyarakat Indonesia selain padi. Pasalnya, sagu menghasilkan pati kering sebagai bahan pangan sumber karbohidrat. Kebutuhan akan pati sagu ditingkat nasional dan internasional mengalami peningkatan yang cukup besar salah satunya untuk kebutuhan industri pangan.

Indonesia memiliki areal tanaman sagu terbesar di dunia, sekitar 1.128 juta Ha atau 51,3 persen dari 2.291 juta Ha areal sagu dunia. Sebaran lahan pohon sagu tersebar di Indonesia terdapat di beberapa wilayah yaitu Papua, Maluku, Riau, Sulawesi Tengah dan Kalimantan. Sagu memiliki jumlah kalori yang cukup tinggi, sehingga pada awalnya sebagian masyarakat Indonesia menjadikan sagu sebagai makanan pokok. Namun pemanfaatan sagu dewasa ini sudah mulai ditinggalkan karena masyarakat

lebih memilih beras dari pada sagu, padahal bila dilihat dari kandungan kalornya, sagu memiliki kandungan yang tidak jauh berbeda dengan beras. Kadar karbohidrat sagu setara dengan karbohidrat yang terdapat pada tepung beras, singkong dan kentang, bahkan dibandingkan dengan tepung jagung dan terigu kandungan karbohidrat tepung sagu relatif lebih tinggi.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kawasan pengembangan ketahanan pangan nasional sentra penghasil sagu di Indonesia. Sekitar 50% kebutuhan sagu nasional di suplai dari Kabupaten Kepulauan Meranti bahkan telah dinobatkan sebagai Pusat Pengembangan Tanaman Sagu Nasional. Dari tujuh komoditas perkebunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Sagu mendominasi 77% dari total produksi sektor perkebunan. Luas area tanaman sagu rakyat di Kepulauan Meranti 42,130 Ha, yakni sekitar 2,98 persen luas tanaman sagu nasional. Perkebunan sagu di Meranti telah menjadi sumber penghasilan utama hampir 20 persen masyarakat Kepulauan Meranti. Tanaman sagu atau rumbia termasuk dalam jenis tanaman palmae tropik yang menghasilkan kanji (*starch*) dalam batang (*stem*). Tanaman sagu dewasa atau masak tebang (siap panen) berumur 8 sampai 12 tahun dengan tinggi 3-5 meter.

Dapat dilihat bahwa sebaran lahan sagu mendominasi hampir diseluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun pemanfaatan sagu sebagai pangan sumber karbohidrat di Kepulauan Meranti masih rendah dibandingkan komoditas pangan beras. Apabila dibandingkan dengan luas areal sawah Kabupaten Kepulauan Meranti yang hanya seluas 4.241 Ha maka sagu menempati posisi tertinggi sebab luas komoditi sagu di Kepulauan Meranti jauh lebih luas daripada luas areal sawah. Luas tanam padi sawah pada tahun 2015 di Kepulauan Meranti seluas 3.162 Ha dan luas

panen padi sawah seluas 3.510 Ha. Untuk produksi gabah kering panen padi yakni sebanyak 12.496 ton. Jumlah produksi tersebut masih belum mampu mencukupi kebutuhan beras di Kepulauan Meranti yakni sekitar 28.000 ton. Selain itu, ketahanan sagu Meranti terhadap hama dan karat daun tergolong tahan dan tidak berefek pada pertumbuhan, perkembangan dan produksi pati sagu.

Selain diolah menjadi tepung, bentuk pengolahan tepung sagu yang telah diproduksi menghasilkan berbagai macam jenis makanan seperti mie sagu, sagu rendang, gobak sagu, sagu lemak, kue-kue berbahan dasar sagu dan lain lain. Sentra pengolahan tersebut berada di 9 kecamatan yang ada di Kepulauan Meranti. Hasil tersebut merupakan hilirisasi dari pengolahan tepung sagu yang memiliki peluang pasar tinggi untuk di distribusikan. Selain itu, Pemerintah juga telah mencanangkan produk usaha utama yaitu beras analog dan gula cair yang merupakan pengembangan usaha berbahan dasar sagu sebagai wujud ketahanan pangan lokal namun masih terkendala akan teknologi yang belum memadai.

Banyaknya jumlah produksi sagu yang ada di Kepulauan Meranti belum menjamin pemanfaatan sagu sebagai pangan lokal pengganti beras yang selama ini dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini dilihat dari masih banyaknya pasokan beras yang diimpor dari luar serta ketergantungan masyarakat terhadap raskin yang diberikan oleh pemerintah sehingga masyarakat hanya menjadikan sagu sebagai makanan pokok kedua. Budidaya sagu juga sangat sesuai dengan kultur alam yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk itulah pemerintah harus memberikan dorongan untuk pertumbuhan usaha masyarakat dalam memperkaya bahan makanan turunan sagu untuk dijadikan sebagai bahan pangan lokal.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 bahwa “Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal”.

Hal ini patut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah terutama bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melakukan pemanfaatan sagu dalam rangka penyelenggaraan program Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Akan tetapi pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan dan konsumsi pangan lokal yakni makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal dilihat masih kurang.

Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya media sosialisasi dari pemerintah dimana bisa dilihat dari minimnya frekuensi dan media sosialisasi yang digunakan untuk mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan pangan lokal yakni sagu yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini karena sagu memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan.

Selain itu, program yang telah dibuat oleh Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti masih belum berjalan optimal dan terkendala oleh teknologi yang kurang memadai. Sosialisasi dan Promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang dimaksudkan untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat melalui upaya-upaya penyebarluasan informasi, kesadaran sikap dan perilaku serta ajakan untuk memanfaatkan pangan

lokal sebagai sumber gizi keluarga demi terciptanya pola hidup yang sehat, aktif dan produktif juga dinilai masih belum dijalankan secara optimal di Kepulauan Meranti.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan pokok Sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penerapan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penerapan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penerapan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pemerintah kabupaten kepulauan meranti dalam penerapan perpres tersebut.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Akademis
  1. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu yakni ilmu administrasi publik, khususnya di bidang implementasi kebijakan.
  2. Sebagai bahan masukan serta informasi bagi peneliti lain yang ingin membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut, tentang permasalahan dan kajian yang sama di masa yang akan datang.
- b. Secara praktis
  1. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
  2. Sebagai bahan informasi atau gambaran yang lebih rill, khususnya mengenai Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penerapan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

### 1.4 Konsep Teori

#### 1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik diartikan sebagai tahapan praktis dan aktivitas dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut George C. Edwards III dalam Subarsono (2009:90-91), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni :

- a) Komunikasi,
- b) Sumberdaya
- c) Disposisi
- d) Struktur birokrasi

Menurut Grindle dalam Nugroho (2011:627) bahwa setelah kebijakan di transformasikan, barulah setelah itu

implementasi kebijakan dapat dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

Menurut Mazmanian, D.A dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2008:184) dalam mempelajari masalah implementasi kebijakan, berarti berusaha memahami “apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan” yakni peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan/legislasi kebijakan publik baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Purwanto dkk. (2012:20) mengemukakan bahwa : Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan pelaksanaan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2014:159-163), variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi adalah :

1. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan
2. Sumber sumber kebijakan
3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan
4. Karakteristik badan pelaksanaan
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
6. Disposisi atau sikap pelaksana

Berdasarkan uraian teori implementasi kebijakan, peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn karena teori ini memiliki variabel yang relevan dengan permasalahan yang ingin diteliti yang menyatakan ada beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja sebuah implementasi kebijakan publik yaitu, standar

dan tujuan kebijakan, sumberdaya kebijakan, komunikasi inter-organisasional, karakteristik pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi atau sikap pelaksana.

## 2. Pangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 1 bahwa : Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Penyelenggaraan pangan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri
- b. Menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat
- c. Mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi
- e. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri
- f. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat

- g. Meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan, dan
- h. Melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.

## 3. Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) bahwa penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Soetrisno (2003) mendefinisikan penganekaragaman konsumsi pangan yaitu sebagai upaya menganekaragamkan jenis pangan yang dikonsumsi, mencakup pangan sumber energi dan zat gizi, sehingga memenuhi kebutuhan akan pangan dan gizi sesuai dengan kecukupan baik ditinjau dari kuantitas maupun kualitas.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang dalam jumlah dan komposisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi yang dapat mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Penganekaragaman tanaman pangan atau konsumsi pangan menurut Suyastiri (2008) memiliki dua bentuk tujuan dari aspek pelaksanaan, yaitu tujuan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan tujuan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat.

## 4. Sumber Daya Lokal

Sumber daya merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Selain itu, sumber daya juga dapat dikatakan sebagai

segala sesuatu yang merupakan aset untuk mencapai tujuan. Sumber daya yang ada dapat berubah, baik baik semakin besar maupun hilang. Adapula sumber daya yang kekal (selalu tetap). Adapula istilah sumber daya yang dapat pulih atau terbarukan seperti tanaman dan hewan (sumber daya hayati).

Menurut Wartyo (2011:17) Sumber daya lokal menekankan pada potensi atau aset yang dimiliki oleh daerah setempat. Selain itu sumber daya lokal juga merupakan keunggulan lokal yang harus dikembangkan dari potensi daerah. Konsep mengenai sumber daya lokal adalah keberadaan, atau ketersediaan sumber daya dan potensi masyarakat setempat dengan berbagai keunikannya sehingga menjadi tolok ukur masyarakat yang bersangkutan dalam penanggulangan masalah sosial. Sehingga dalam hal ini termasuk dalam panganekaragaman konsumsi pangan sesuai dengan sumber daya lokal.

## 1.5 METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat. tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan mengguyuhkan apa adanya.

### 2. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan di kantor pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Hortikultura, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan

UMKM, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA), serta masyarakat Kab. Kepulauan Meranti yang mengkonsumsi sagu dan petani sagu yang merupakan kelompok sasaran dalam program P2KP. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi ini karena Kepulauan Meranti merupakan daerah yang sangat berpotensi untuk menjadikan sagu sebagai pangan lokal namun program P2KP masih belum berjalan.

### 3. Informan penelitian

Dalam menentukan informan penelitian ini adalah dengan cara *snowball sampling* yaitu penentuan informan yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian mencari informan lain yang terlibat dalam proses penerapan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga jumlah informan semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar. Adapun yang menjadi *key informan* adalah :

No	Informan
1	Kepala Bidang Ketahanan Pangan (Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan)
2	Kepala Bidang Perkebunan ( Dinas Perkebunan dan Hortikultura)
3	Kepala Bidang Perindustrian (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM)
4	Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA)
5	Masyarakat yang mengkonsumsi sagu
6	Petani Sagu

### 4. Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer : adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan

secara langsung pada data yang dibutuhkan. Data tersebut berupa hasil wawancara serta Informasi mengenai penerapan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis sumber daya lokal yang dalam hal ini merupakan konsumsi pangan sagu di Kepulauan Meranti.

2. Data Sekunder : adalah data yang diperoleh dari laporan instansi dan keterangan lainnya yang mendukung penelitian ini, diantaranya terdiri dari :
  1. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
  2. Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 tentang Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
  3. Peraturan Menteri Pertanian RI No. 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
  4. Program “One Day With Sagu” Kab. Kepulauan Meranti.
  5. Skripsi Tresna Widyawati Tentang Implementasi Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal di Kota Pekanbaru.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Pengamatan (Observasi)**

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung pada Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Hortikultura, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA), serta masyarakat Kab. Kepulauan Meranti yang mengkonsumsi sagu dan petani sagu. Penulis mengadakan

pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penerapan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

### **b. Wawancara**

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui percakapan langsung mendalam, tidak berstruktur dan individual antara peneliti dengan informan penelitian dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam hal ini hal yang diwawancarai berkaitan dengan Penerapan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yakni sagu di Kepulauan Meranti.

### **c. Studi Kepustakaan**

Yaitu teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan literatur maupun dokumen dari perpustakaan yang berhubungan atau berkaitan dengan judul dan masalah yang akan dibahas. Pengumpulan data dengan cara membaca literatur seperti buku, jurnal, dan pemberitaan media massa seputar masalah penelitian, atau dapat juga dari beberapa dokumen mengenai gambaran umum lokasi penelitian atau hal-hal lain yang dapat mendukung hasil penelitian yang berhubungan dengan judul

## **6. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penyerderhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan adalah analisis yang bersifat penalaran mengenai fenomena-fenomena yang akan diteliti, setelah data dikumpulkan melalui teknik observasi dan

wawancara kemudian penulis menganalisis data secara deskriptif kualitatif.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan devaliditas terhadap penelitian ini, peneliti melakukan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang peneliti lakukan selama di lapangan dengan Judul Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penerapan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Analisis fenomena di lapangan peneliti menggunakan teori Van Meter & Van Horn.

### **1. Ukuran Dasar atau Tujuan Kebijakan**

Ukuran Dasar adalah suatu standar yang dijadikan sebagai patokan berdasarkan hasil pengkajian yang telah di patenkan secara resmi. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Biasanya berbentuk dokumen formal yang berisi spesifikasi, teknis, maupun kriteria- kriteria yang telah di tetapkan. Sedangkan tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, dan tujuan dapat diukur dengan standar yang telah ditetapkan.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penerapan Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal tujuan kebijakannya dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara berikut :

*“Jadi kami dari Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan telah membuat program yang diberi nama **One Day With Sagu** yang mana tujuannya adalah untuk memperkenalkan sagu kepada masyarakat yang biasanya mengkonsumsi beras/nasi untuk beralih ke sagu karena sesuai dengan perintah dari pusat (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian) dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi sempena hari pangan sedunia yang diadakan tahun lalu agar penganekaragaman pangan lebih digalakkan khususnya bagi Kab. Kepulauan Meranti sendiri. Selain itu tujuannya untuk mengurangi pasokan beras dari luar dan lebih memanfaatkan potensi sagu yang dimiliki Kepulauan Meranti”.*

**Wawancara dengan Seksi Pengawas Mutu Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Meranti, Wita Fawlia S.P, 23 Maret 2017**

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, ukuran dasar atau tujuan dari program penganekaragaman pangan yakni *“One Day with Sagu”* ialah untuk memperkenalkan sagu dan membiasakan masyarakat yang sebelumnya mengkonsumsi beras agar beralih ke sagu karena sesuai dengan kearifan lokal dan potensi pangan sagu yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai penghasil sagu terbaik yang ada di Indonesia. Selain itu tujuan dari program ini

juga untuk mengurangi pasokan beras atau impor beras dari luar yang selama ini dilakukan oleh Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga dengan adanya program ini potensi sagu sebagai pengganti beras bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mencapai ketahanan pangan.

## **2. Sumber-sumber Kebijakan**

Selain sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sarana dan prasarana juga menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan serta sebagai penunjang sebuah kebijakan atau program dengan baik. Dalam sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan yakni program “*One Day With Sagu*” di Kepulauan Meranti, Dinas Ketahanan Pangan, tanaman Pangan dan Peternakan telah membentuk tim yang diarahkan untuk memperkenalkan konsumsi pangan sagu kepada masyarakat.

Dari hasil observasi bahwa dari segi sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana masih mengalami kendala yang menjadi penghambat terimplementasinya kebijakan. Dari sumber daya manusia yang dimiliki untuk tingkat Kabupaten masih belum terampil dalam mensosialisasikan program tersebut sedangkan untuk sarana dan prasarana juga masih kurang digencarkan dalam menggaungkan sagu sebagai pangan lokal sehingga menghambat keberhasilan program tersebut. Maka dari itu jika sumber daya baik dari sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana sudah cukup memadai diharapkan akan menjadi penunjang keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan.

## **3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan**

Dari hasil observasi dapat diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Meranti bekerjasama dengan beberapa pihak atau instansi yang memiliki

kaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan ini, seperti : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kepulauan Meranti,serta Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kepulauan Meranti. Sampai saat ini pihak-pihak tersebut memberi dukungan serta kontribusi demi terealisasinya program *One Day With Sagu* sebagai upaya penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Dukungan program konsumsi sagu sebagai pangan lokal oleh Gubernur Riau juga telah diamanatkan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Melalui pembentukan struktur organisasi dan tatanan kerja yang jelas pembagiannya, pihak-pihak terkait menyelesaikan tugas serta memberi kontribusi yang baik demi terealisasinya kebijakan ini.

## **4. Karakteristik Badan Pelaksana**

Dalam Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menjadikan sagu sebagai konsumsi pangan lokal, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Meranti menjalankan program sesuai dengan *Standar Operating Procedure (SOP)* yang termuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang mana ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa implementor kebijakan atau dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan di Kepulauan Meranti belum melaksanakan tanggung jawabnya secara optimal dalam mensosialisasikan program *One Day With Sagu* kepada masyarakat. Masih banyak

masyarakat yang bingung dan belum mengetahui tentang program tersebut. Hal ini belum sesuai dengan pedoman program P2KP yang tertera didalam Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Konsumsi Pangan.

### **5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik**

Dari hasil observasi dapat diketahui bahwa kondisi politik turut serta mendukung terealisasinya kebijakan ini, Program Konsumsi Pangan Lokal merupakan kebijakan yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah dalam bentuk Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pertanian yang termuat jelas secara rinci tentang keseluruhan tahapan pelaksanaan kebijakan. Jadi dalam hal kondisi politik, implementor kebijakan mendapatkan dukungan penuh, namun berdasarkan hasil wawancara kondisi sosial dan ekonomi tampaknya menjadi penghambat terealisasinya kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini, karena kondisi sosial dan ekonomi merupakan keadaan sebenarnya yang dirasakan oleh kelompok sasaran kebijakan maka untuk itu peran serta partisipasi masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan merupakan aspek penunjang keberhasilan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

### **6. Disposisi/sikap Pelaksana**

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Meranti merespon dengan baik pelaksanaan kebijakan, mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh atasan berdasarkan kewajiban dan kepentingan organisasi. Sebagian besar implementor kebijakan paham dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan ini serta menilai bahwa

program tersebut memang sepatutnya digalakan dalam mengedepankan kearifan lokal yang dimiliki oleh Kepulauan Meranti untuk memanfaatkan sagu sebagai pangan lokal masyarakat. Sehingga mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketetapan yang seharusnya.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa sebagian besar implementor kebijakan merespon kebijakan dengan baik dan mendukung pelaksanaan kebijakan dengan melakukan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan meski tidak seluruhnya. implementor kebijakan menerima dengan baik kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena mengetahui arah tujuan kebijakan serta menilai bahwa kebijakan yang ditetapkan memiliki manfaat besar bagi perkembangan daerah.

### **B. Faktor-factor yang mempengaruhi**

Keberhasilan Pemerintah dalam Upaya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal dapat dilihat dari realisasi dan sosialisasi kepada masyarakat apakah sudah mencapai tujuan dari program yang telah ditetapkan ataupun belum. Program *One Day With Sagu* bertujuan untuk mensosialisasikan sagu sebagai pangan lokal pengganti beras bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan kearifan lokal dan potensi alam yang ada. Selain itu program ini bertujuan untuk mengurangi pasokan beras dari luar sehingga lebih memanfaatkan pangan lokal yang tersedia yaitu sagu. Akan tetapi kenyataan nya dilapangan menunjukkan bahwa sosialisasi gerakan penganekaragaman Konsumsi Sagu sebagai pangan lokal masih belum mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 1. Sumber Daya

Sumber daya kebijakan baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang tersedia kurang memadai. Kurang terampilnya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam mensosialisasikan program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yakni *One Day with Sagu* kepada masyarakat. Sarana dan prasarana yang tersedia kurang mendukung seperti pengadaan pamflet atau poster sebagai media sosialisasi masih belum ada, selain itu belum memadainya teknologi yang ada dalam mengolah sagu menjadi beras.

## 2. Respon Masyarakat

Respon masyarakat yang masih kurang dalam menerapkan konsumsi sagu sebagai pangan lokal, karena kondisi ekonomi, sosial, pola hidup dan kebiasaan masyarakat yang sejak dahulu sudah terbiasa mengkonsumsi beras/nasi sebagai makanan pokok sehingga hanya menjadikan sagu sebagai makanan pokok kedua atau makanan sampingan.

## 3. Sosialisasi kurang terakomodir

Kurang terakomodirnya program *One Day With Sagu* Sebagai Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program ini sehingga belum dapat berjalan secara maksimal di Kepulauan Meranti. Hal ini dikarenakan sosialisasi program dilakukan sebulan sekali dan masih dalam tahap pengenalan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi sagu sebagai pangan lokal.

Faktor-faktor tersebutlah yang mempengaruhi Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penerapan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penerapan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal belum terimplementasi dengan baik karena realisasi dan respon masyarakat belum sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kurangnya dukungan sumber daya yang tersedia baik sarana dan prasarana penunjang yang mempermudah sosialisasi Program P2KP *One Day with Sagu* di Kabupaten Kepulauan Meranti serta kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mensosialisasikan program tersebut sehingga belum mampu melaksanakan tugasnya secara optimal. Respon masyarakat masih kurang dalam menerapkan konsumsi sagu sebagai pangan lokal, karena kondisi sosial, ekonomi, pola hidup dan kebiasaan masyarakat yang sejak dahulu sudah terbiasa mengkonsumsi beras/nasi sebagai makanan pokok sehingga hanya menjadikan sagu sebagai makanan pokok kedua atau makanan sampingan.

### B. Saran

1. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan hendaknya fokus dan melakukan sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat tentang program *One Day with Sagu* sebagai salah satu gerakan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) berbasis sumber daya lokal. Sehingga kearifan lokal yang dimiliki oleh Kepulauan Meranti yaitu sagu bisa dimanfaatkan dengan baik sebagai pangan pokok

pengganti beras agar mengurangi impor beras dari luar yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia agar memiliki keahlian dan keterampilan yang baik dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam menjalankan program sehingga mampu mensosialisasikan program penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 yang menjadi acuan dalam menjalankan program dari Pemerintah Daerah atau Dinas terkait. Sehingga tujuan dari program tersebut bisa tercapai.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

- Bintoro, H. M. 2010. *Sagu dilahan Gambut*. IPB Press : Bogor.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Gajah Mada University Press : Yogyakarta.
- Harnowo, Agus, Abdurachman Ade. 2014. *Harapan Baru Tanah Sagu*. EMP Malacca Strait : Jakarta.
- Louhenapessy, J. E. 2010. *Sagu Harapan dan Tantangan*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya : Bandung.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo : Jakarta.
- Prasetya, Irawan. 2006. *Metode Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Self Press : Jakarta.
- Purwanto, Erwan Agus, dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan*

*Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media : Yogyakarta.

- Subarsono, A. G. 2009. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta : Bandung.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Alaf Riau : Pekanbaru.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Erlangga : Jakarta.
- Tachjan. 2005. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI : Bandung.
- Wahab, Solihin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UM Press : Malang.
- Warto. 2011. *Kearifan Lokal Masyarakat Pedesaan dalam Upaya Penanganan Kemiskinan*. B2P3KS Press : Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2014. *Teori, Proses dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Media Presdindo : Yogyakarta.
- Yuwono, Triwibowo. 2011. *Pembangunan Pertanian : Membangun Kedaulatan Pangan*. Gajah Mada University Press : Yogyakarta.
- ##### **Skripsi :**
- Widyawati, Tresna. 2015. *Implementasi Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal di Kota Pekanbaru*. Universitas Riau : Pekanbaru.
- ##### **Dokumen :**
- Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 tentang Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Peraturan Menteri Pertanian RI No. 9 Tahun  
2014 tentang Pedoman Gerakan  
Percepatan Penganekaragaman  
Konsumsi Pangan.

Program “One Day With Sagu” di  
Kabupaten Kepulauan Meranti.

**Website** :

[m.utusanriau.co/index.php?/det/27315](http://m.utusanriau.co/index.php?/det/27315).

Diakses Mei 2017.

[Riausky.com](http://Riausky.com). Diakses Juni 2017